



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 99 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 234 TAHUN 2019
TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan penetapan Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 234 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan perkembangan pekerjaan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 234 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 234 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Perubahan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mencakup:
- a. penambahan Standar Operasional Prosedur baru di Unit Organisasi; dan
 - b. perbaikan Standar Operasional Prosedur di Unit Organisasi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, setiap Unit Organisasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah wajib mengacu pada Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan.
- KEEMPAT : Pimpinan Unit Organisasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah harus melakukan pengawasan atas penerapan Standar Operasional Prosedur di unit kerjanya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2021
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN
ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH NOMOR 234 TAHUN 2019
TENTANG PENETAPAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR DI LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR : 99 TAHUN 2021

TANGGAL : 28 APRIL 2021

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Unit Organisasi	No	Nama SOP	Nomor SOP
Biro Perencanaan, Organisasi Dan Tata Laksana	1	PENERBITAN SURAT TUGAS JF	07/SOP/BPOT/2020
	2	NOTA DINAS/SURAT DINAS MASUK MELALUI EOFFICE	08/SOP/BPOT/2020
	3	PERSETUJUAN/TIDAK NAMA ANGGOTA TIM YANG BERASAL DARI PERMINTAAN UNIT ORGANISASI ESELON I/II LAIN	09/SOP/BPOT/2020
	4	NOTA DINAS/SURAT DINAS KELUAR MELALUI EOFFICE	10/SOP/BPOT/2020
Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Umum	5	PELAYANAN PENAFSIRAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DI BIDANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	26/SOP/D1.1/2020
	6	PENYUSUNAN KAJIAN KEBIJAKAN TERHADAP ISU AKTUAL	27 /SOP/D.1.1/2020
	7	PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN LKPP DI BIDANG PENGADAAN BARANG/JASA	28 /SOP/D.1.1/2020
	8	TINDAK LANJUT PENGADUAN PELAYANAN PENAFSIRAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DI BIDANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	29 /SOP/D.1.1/2020
Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus	9	KONSULTASI SURAT TENTANG KEBIJAKAN PENGADAAN KHUSUS	17/SOP/D1.2/2020
	10	PENDAMPINGAN PENYUSUNAN PERATURAN/PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BLU/BLUD, BUMN/BUMD, BADAN	18/SOP/D1.2/2020

		HUKUM PUBLIK DAN PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA	
Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional	11	PENYUSUNAN KAJIAN PENGEMBANGAN IKLIM USAHA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI PENYEDIA	11/SOP/D1.3/2019
	12	PENYUSUNAN KAJIAN PENGEMBANGAN IKLIM USAHA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN METODE SWAKELOLA	13/SOP/D1.3/2019
	13	PENYUSUNAN POSISI INDONESIA DALAM WORKING GROUP GOVERNMENT PROCUREMENT DALAM RANGKA PERSIAPAN PELAKSANAAN PERUNDINGAN INTERNASIONAL	12/SOP/D1.3/2019
	14	PEMBERIAN PENDAPAT MENGENAI PBJP DALAM RANGKA PERSIAPAN PELAKSANAAN TENDER/SELEKSI INTERNASIONAL MELALUI DISKUSI	14/SOP/D1.3/2019
	15	PEMBERIAN PENDAPAT MENGENAI PBJP DALAM RANGKA PERSIAPAN PELAKSANAAN TENDER/SELEKSI INTERNASIONAL TANPA DISKUSI	15/SOP/D1.3/2019
Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan	16	PENANGANAN MASALAH AKSES SIRUP	24/SOP/D.2.1/2020
	17	PERMOHONAN USER ID ADMIN PPE APLIKASI SIRUP	25/SOP/D2.1/2020
	18	PENANGANAN PENGADUAN TERKAIT SIRUP MELALUI EMAIL	48/SOP/D2.1/2014
	19	PENGHAPUSAN FILE ANGGARAN PADA APLIKASI SIRUP	53/SOP/D2.1/2018
	20	RESTART APLIKASI SIRUP	55/SOP/D2.1/2018
Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	21	PENETAPAN PENYELENGGARA PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (PPMSE) ATAU E-MARKETPLACE SEBAGAI MITRA APLIKASI BELA PENGADAAN	06/SOP/D2.3/2020
	22	PELAKSANAAN BIMBINGAN TEKNIS LPSE	49/SOP/D2.3/2020
	23	PERMOHONAN SOSIALISASI/ BIMBINGAN TEKNIS SPSE	50/SOP/D2.3/2020
	24	PERMOHONAN AKUN DASHBOARD SPSE TERPUSAT	73/SOP/D2.3/2020
	25	PERMOHONAN AKUN AUDITOR SPSE TERPUSAT	74/SOP/D2.3/2020
Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan	26	PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT	30 /SOP/D.3.1/2020
	27	REKOMENDASI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	31/SOP/D.3.1/2020

	28	PENDAFTARAN PESERTA PENYESUAIAN/INPASSING JF PPBJ MELALUI SISTEM INPASSING	32/SOP/D.3.1/2020
	29	REKOMENDASI PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DAN PENYAMPAIAN HASIL UJI KOMPETENSI PENYESUAIAN/INPASSING JF PPBJ	33/SOP/D.3.1/2020
	30	APPROVAL PERMOHONAN ADMIN SIMKU UNTUK K/L/I DAN PEMDA	75/SOP/D3.1/2016
Pusdiklat	31	PENGAJUAN SUMBER DAYA MANUSIA	51/SOP/PUSDIKLAT/2020
	32	PENYUSUNAN DAN PENGENDALIAN DOKUMEN	52/SOP/PUSDIKLAT/2020
	33	PENYUSUNAN PROGRAM/RENCANA DAN PELAKSANAAN TRAINING	53/SOP/PUSDIKLAT/2020
	34	PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA	54/SOP/PUSDIKLAT/2020
	35	PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN SARANA PRASARANA	55/SOP/PUSDIKLAT/2020
	36	FASILITASI PELATIHAN	56/SOP/PUSDIKLAT/2020
	37	PELAKSANAAN PELATIHAN FUNGSIONAL	57/SOP/PUSDIKLAT/2020
	38	PUBLIKASI DOKUMEN DAN INFORMASI	58/SOP/PUSDIKLAT/2020
	39	KERJA SAMA MOU/PKS DENGAN PIHAK KETIGA	59/SOP/PUSDIKLAT/2020
	40	PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN	60/SOP/PUSDIKLAT/2020
	41	PERSIAPAN PELATIHAN TEKNIS	70/SOP/PUSDIKLAT/2020
	42	PELAKSANAAN PELATIHAN TEKNIS	71/SOP/PUSDIKLAT/2020
	43	PELAPORAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PELATIHAN TEKNIS	72/SOP/PUSDIKLAT/2020
Dit. Penanganan Permasalahan Hukum	44	PERMOHONAN PENGAJUAN LAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	34/SOP/D4.3/2020
	45	PELAYANAN PEMBERIAN KETERANGAN AHLI PENGADAAN	94/SOP/D4.3/2012
	46	LAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	39/SOP/D4.3/2018
Inspektorat	47	PELAKSANAAN AUDIT/REVIU/EVALUASI/PENUGASAN LAINNYA	71 /SOP/INSPEKTORAT/2016
	48	PELAPORAN AUDIT/REVIU/EVALUASI/PENUGASAN LAINNYA	72/SOP/INSPEKTORAT/2016
	49	PELAPORAN ATAS PENGELOLAAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN	73/SOP/INSPEKTORAT/2016
	50	PENGELOLAAN SURAT KELUAR INSPEKTORAT	76/SOP/INSPEKTORAT/2016
	51	PEMINJAMAN DOKUMEN INSPEKTORAT	77/SOP/INSPEKTORAT/2016

52	PEMANTAUAN PELAKSANAAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI	78 /SOP/INSPEKTORAT/2016
53	PERENCANANAAN AUDIT/ REVIU/ EVALUASI/ PENUGASAN LAINNYA	82 /SOP/INSPEKTORAT/2016
54	PENYUSUNAN ANGGARAN INSPEKTORAT	83 /SOP/INSPEKTORAT/2016
55	PENYUSUNAN LAPORAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN INSPEKTORAT	05/SOP/INSPEKTORAT/2018
56	PENGINPUTAN BERITA ACARA KESEPAKATAN TINDAK LANJUT PADA APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMANTAUAN HASIL PENGAWASAN	14/SOP/INSPEKTORAT/2018
57	INPUTER SISTEM INFORMASI PEMANTAUAN HASIL PENGAWASAN INSPEKTORAT	15/SOP/INSPEKTORAT/2018
58	PEMANTAUAN HASIL PENGAWASAN INSPEKTORAT MELALUI SISTEM INFORMASI PEMANTAUAN HASIL PENGAWASAN	16/SOP/INSPEKTORAT/2018
59	PELAPORAN GRATIFIKASI	28 /SOP/INSPEKTORAT/2018
60	PENGELOLAAN DAN TINDAK LANJUT SURAT MASUK	19/SOP/INSPEKTORAT/2020
61	PELAKSANAAN PROGRAM PELATIHAN MANDIRI (PPM)	20/SOP/INSPEKTORAT/2020
62	PELAKSANAAN RAPAT	21/SOP/INSPEKTORAT/2020
63	PERMINTAAN DATA/DOKUMEN AUDIT/REVIU/EVALUASI/PENUGASAN LAINNYA	22/SOP/INSPEKTORAT/2020
64	PEMBAHASAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN	23/SOP/INSPEKTORAT/2020
65	PENYIMPANAN DOKUMEN HASIL PENGAWASAN	01/SOP/INSPEKTORAT/2020
66	PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAN KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERNAL	02/SOP/INSPEKTORAT /2020
67	EVALUASI PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI	03/SOP/INSPEKTORAT /2020
68	PELAKSANAAN EVALUASI PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)	04/SOP/INSPEKTORAT /2020
69	EVALUASI PETA RISIKO	05/SOP/INSPEKTORAT /2020

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO